

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung kedudukannya berada di Gedung Keuangan Negara, Bandung, Jawa Barat dengan wilayah kerja meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan dan penyajian informasi perpajakan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi;
11. Pembetulan ketetapan pajak;
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

2.1.2 Logo Instansi

Setiap instansi pasti memiliki logo atau simbol dan tentunya memiliki arti penting bagi instansi tersebut, seperti di bawah ini adalah logo instansi di bidang perpajakan :



Gambar 2.1
Logo Instansi

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung menggunakan logo Direktorat Jenderal Pajak, karena seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Makna dari keseluruhan lambang ini sesuai dengan motto “Nagana Dana Rakca” yaitu ungkapan suatu

daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

2.1.3 Visi dan Misi Instansi

Visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung disesuaikan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Instansi

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

2. Misi Instansi

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang – Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya adalah sebagai berikut :

- d. Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- f. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumbernya bersifat strategis dan potensial.
- g. Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan ketetapan perpajakan.
- h. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
- i. Mengkoordinasikan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan pembayaran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan pemeriksaan pajak.

2. Sub Bagian Umum

Melakukan urusan yang berkaitan dengan kepegawaian, keuangan instansi, tata usaha dan rumah tangga.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-FILLING serta penyajian laporan kinerja pegawai / fiskus.

4. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, pelaksanaan eksentifikasi serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penagihan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.

8. Kelompok Fungsional

Melakukan kegiatan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan jatuh tempo berakhirnya masa perpajakan.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Tujuan utama dari Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya adalah penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya mempunyai beberapa strategi bisnis, yaitu dengan berkomitmen melakukan perbaikan – perbaikan sistem administrasi, meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap sektor – sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak, pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang lebih terencana, terarah, akurat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengendalian Sistem Pengendalian Internal untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun berikutnya.

2.4.1 Aspek Praktek Manajemen

1. Aspek Jasa

Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya berorientasi terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung bertujuan untuk melayani administrasi perpajakan seperti :

- a. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa.

- b. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP).
- d. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- e. Penerbitan Surat Keterangan Bebas pemotongan PPh dan PPN.
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- g. Penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

2. Aspek Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung merupakan sebuah institusi pemerintah yang melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk menunjang pengeluaran Negara di berbagai sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya akan mendapatkan suatu Dana Alokasi Kegiatan (DAK). Dana Alokasi Kegiatan (DAK) adalah dana yang diberikan oleh Kantor Pusat untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang kemudian dialokasikan ke setiap seksi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut. Setiap seksi harus memaksimalkan Dana Alokasi Kegiatan (DAK) tersebut sesuai dengan kebutuhan masing – masing. Kemudian realisasi penggunaan Dana Alokasi Kegiatan (DAK) tersebut akan dibuat pertanggung jawabannya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dilaporkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Kantor Pusat.

3. Aspek Publikasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung mempublikasikan berbagai layanan ke dalam beberapa cara. Cara pemasaran tersebut yaitu dengan memberikan penyuluhan langsung kepada para Wajib Pajak dengan sejelas – jelasnya. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan layanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu situs resmi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung juga memasang spanduk yang dipasang di area kantor yang berguna untuk mengingatkan Wajib Pajak tentang pentingnya disiplin membayar pajak. Selain itu terdapat pula iklan layanan masyarakat tentang “Cara Cepat dan Mudah Mengadukan dan Memperoleh Informasi Perpajakan” yang dikenal dengan nama “Kring Pajak – (021) 500200”.

4. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang paling berharga bagi sebuah instansi/perusahaan. Meskipun sudah memiliki teknologi yang canggih, namun bila Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mendukung, maka seiring berjalannya waktu kualitas pelayanannya pun akan semakin menurun.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung sebagian besar diisi oleh lulusan dari DI dan DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), atau melalui rekrutmen yang dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut selanjutnya ditempatkan

sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan dan disesuaikan dengan tingkat masing – masing untuk menetapkan posisi dan bagian yang akan mereka tempati. Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi calon pegawainya sebelum mereka menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Tetap, pelatihan ini dimaksudkan untuk membangun integritas pegawai, karena menjadi seorang pemeriksa pajak mempunyai risiko dan godaan yang sangat tinggi, sehingga harus diimbangi dengan integritas yang tinggi serta tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara. Seorang pemeriksa pajak telah ditetapkan untuk pensiun saat usianya mencapai 60 tahun sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1995.

2.4.2 Aktivitas Praktek Kerja Lapangan

Selama pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, penulis di tempatkan di bagian Kelompok Fungsional III Pemeriksa Pajak. Jenis - jenis pajak yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung meliputi pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak subjektif, pajak objektif dan pajak pusat. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan penulis diberikan tugas - tugas untuk turut serta membantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan faktor masukan & keluaran pajak.